

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menggunakan model sistem desentralisasi. Dengan sistem desentralisasi, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada suatu daerah untuk mengatur urusan pemerintah di daerahnya sendiri. Wewenang daerah yang diterima dari pemerintah pusat itu disebut otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai secara efektif tanggal 1 Januari 2001. Untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dana perimbangan dari pemerintah pusat tersebut, pemerintah daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan dan lain-lain pendapatan. Namun dalam kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari yang oleh pemerintah daerah dilaporkan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Otonomi daerah memiliki implikasi langsung terhadap kebutuhan dana yang cukup besar sebagai modal awal menuju kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana utama pemerintah daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di pakai untuk membiayai belanja modal dan pembangunannya. Namun dalam beberapa tahun berjalan sumber pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja. Pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Tujuan dari transfer itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan fiskal atas pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh provinsi.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, tetapi dana DAK justru belum meluas ke daerah-daerah tertinggal, terluar, terpencil serta yang kapasitas pemerintahannya belum memadai dalam memberikan fungsi pelayanan public, (Isti Peramatasari, 2016). Dengan adanya pengalokasian DAK dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membelanjai biaya yang bersifat umum, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak hanya ditransfer untuk daerah tetapi juga digunakan untuk pos belanja pegawai dan untuk pembangunan infrastruktur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dihasilkan dari daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mentayani et al (2012) pendapatan asli daerah idealnya merupakan sumber pendapatan pokok daerah. Sumber pendapatan lainnya cenderung bersifat fluktuatif dan di luar pengendalian kewenangan daerah. Selain pendapatan asli daerah, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan lain berupa dan perimbangan. Pendapatan asli daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan pemerintahan dan program pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin.

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja-belanja daerah tersebut dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau disebut juga dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu.

Hasil penelitian yang di lakukan oleh Suryani (2018), Della dan Alpon Satrianto (2019), Putri dan Haryanto (2019) menunjukkan dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah. Sedangkan hasil penelitian yang di lakukan oleh Ichsan, Khairur (2018) menunjukkan hasil yang berbeda dimana pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, Maharini (2018) menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah dan Rusmita (2018) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Dalam penelitian ini penulis akan mencoba membahas mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Pada Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), karena dalam bebrapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Yogyakarta mengalami kenaikan dengan di lihat dari fasilitas pelayanan publik yang sudah memadahi, pembangun dan perbaikan jalan, pemeliharaan tempat wisata dan laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara stabil di atas 5% tiap tahun (Badan Pusat Statistik DIY). Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah sehingga peneliti terdorong untuk mengangkat permasalahan dalam bentuk penelitian dengan judul: “Pengaruh Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (Studi Kasus Periode 2013-2018)”

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.3 Batasan Masalah

Penulis memfokuskan penelitian ini pada laporan belanja daerah, dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah periode 2013-2018.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penyusunan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi untuk pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

2. Manfaat Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi pembelajaran dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi publik/pemerintahan.

3. Manfaat Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan refrensi bagi pijak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika berurutan yang terdiri dari beberapa bab, antara lain Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian, Bab V Penutup. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab-bab lainnya. Sistematika ini digunakan untuk memudahkan dalam menyusun skripsi.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Analisis berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi data.

BAB V: PENUTUP

Bab Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan